

Nomor : B/ 245 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
di
Lubuklinggau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi hasil.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa nilai sebesar **74,47** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	25,64	25,73
b. Pengukuran Kinerja	30	21,09	21,34
c. Pelaporan Kinerja	15	12,80	12,20
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,93	15,20
Nilai Hasil Evaluasi	100	74,46	74,47
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang ditetapkan pada sebagian perangkat daerah belum mencakup tugas dan fungsi serta mandat dari perangkat daerah terkait;

- Belum seluruh rumusan indikator kinerja yang dituangkan dalam rumusan sasaran strategis pada dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) untuk mengawal pencapaian sasaran strategis;
- Perbaikan kualitas Indikator Kinerja Utama belum disertai dengan perbaikan perencanaan pada Perjanjian Kinerja perangkat daerah;
- *Cascading*/penjenjangan kinerja yang disusun di perangkat daerah belum mempertimbangkan prinsip *logical framework* dan *critical success factor*;
- *Cascading*/penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sedang dalam tahap pengembangan dan perbaikan aplikasi *e-skp* (penilaian kinerja individu) dan *e-sakip* (monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah), sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Penetapan target kinerja sebagian perangkat daerah belum realistis dan belum berdasarkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum dipublikasikan dalam *website* pemerintah daerah;
- Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja sebagian perangkat daerah masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
- Laporan kinerja pemerintah daerah belum menyajikan analisis yang memadai, seperti informasi terkait *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Selatan maupun secara nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas perangkat daerah, namun pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi belum berjalan optimal;
- Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan belum secara spesifik menggambarkan kondisi implementasi SAKIP di masing-masing perangkat daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan kualitas perencanaan setiap perangkat daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan sesuai dengan mandat tugas fungsi yang diberikan.
- 2) Memastikan kualitas indikator kinerja memenuhi kriteria SMART.
- 3) Memastikan kembali keselarasan pada perencanaan kinerja pada Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya dalam penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja, sehingga konsistensi dalam pencapaian kondisi kinerja dapat terjaga.
- 4) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan prinsip *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
- 6) Mengawal pengembangan *tools* pengukuran kinerja individu dan kinerja pemerintah daerah, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan *tools* tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara *real time* serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja.

- 7) Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan target kinerja kedepan.
- 8) Mempublikasikan laporan kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun perangkat daerah melalui *website* pemerintah daerah sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik.
- 9) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta perbandingannya dengan capaian tingkat regional maupun nasional.
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Wali Kota Lubuklinggau.